

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Aloysius Mudjiyonodan Mahmud Kusuma, 2014. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2012 . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dalam Hukum Pennitesier*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali pers. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2002. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Hasan Alwi, dkk, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka. Jakarta.
- J.M.van Bemmelen, 1984. *Hukum PidanaI: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Bandung.
- Jamaluddin Mahasari, 2008. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Lamintang, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Leden Marpaung, 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- _____, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor.
- S.R. Sianturi, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka. Jakarta.
- Samun. Ismaya, 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Cetakan ke-1. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Schaffineister, N. Keijzer, dan E.P.H. Sutorius, 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. Cetakan ke-1. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarsono, 1999. *Kamus Hukum (Edisi Terbaru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Sutedi, Adrian, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Edisi ke-1. Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta.

Tim KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51/PRP/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No 158)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2016).

C. Makalah/Artikel/Jurnal

Romli Atmasasmita, 2006. *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. Makalah yang disampaikan pada Seminar, *Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. kerja sama UNDIP dan BPHN DEPKEHAMRI.

Ervina Eka Putri, 2018. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengerusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung, Jurnal.Fh.unila

Della Rahmaswary dan Ngadino, 2019. Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/PTUN-BL) Ejournal. UNDIP

D. Internet

Dwiyanto, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim, di akses dari https://eprints.uns.ac.id/18296/3/bab2_1.pdf.

[ejournal.undip.ac.id>notarius>article>download.pdf](http://ejournal.undip.ac.id/notarius/article/download.pdf).

<http://forumpenilaianpublik.blogspot.co.id/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam-7.html>

<https://telegraf.co.id/ancaman-pidana-dan-perdata-penyerobotan-tanah/>

<http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-5-Pertanggung-Jawaban-Pidana-atas-penguasaan-tanah.pdf>.

<http://www.hukumproperti.com/2011/02/22/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13530> Ahli Perpu Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Seharusnya Tidak Berlaku.

<https://www.hukum-hukum.com/2016/10/pidana-pakai-tanah-tanpa-izin.html>. Dipidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Pemilik Tanah Yang Berhak.

[jurnal.fh.unila.ac.id>pidana>article>download.pdf](http://jurnal.fh.unila.ac.id/pidana/article/download.pdf).